

Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintahan Kota Medan

Jukhairia Ritonga¹, Nurlaila²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

jukhairiaritonga2071@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is the realization of the budget based on the performance and analysis of the budget report at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Medan City Government during the 2020-2021 fiscal year. The application of the method in this research is descriptive qualitative, by collecting data through interviews and observations. Based on the research conducted, it was found that there was an influence of the budget with the realized budget, and this became quite appropriate for the Medan City Government BPKAD, so that it became a natural thing if there were funds that had not been delivered to be realized due to the pandemic period that was hitting Indonesia.

Keywords: *Budgeting, Budget Realization*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja dan analisis laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintahan Kota Medan selama tahun anggaran 2020-2021. Penerapan metode pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan cara mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara serta pengamatan (observasi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh anggaran dengan basis kinerja pada anggaran yang direalisasikan, dan hal tersebut menjadi cukup tepat untuk BPKAD Pemerintahan Kota Medan, sehingga menjadi hal yang wajar bila terdapat dana yang belum tersampaikan untuk direalisasikan karena masa pandemi yang masih melanda Indonesia.

Kata Kunci: *Penyusunan Anggaran, Realisasi Anggaran*

PENDAHULUAN

Berdasarkan kebijakan Menteri Dalam Negeri RI No. 77 Tahun 2020, menerangkan mengenai panduan cara tata kelola keuangan daerah, ditetapkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwasanya tata kelola keuangan daerah tersebut meliputi secara menyeluruh aktivitas yang mencakup pembuatan rencana, anggaran, tata laksana, tata usaha, pembuatan laporan, adanya tanggung jawab, serta pemeliharaan keuangan yang terdapat di dalamnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu perancangan anggaran pertahun yang ditetapkan dalam PERDA (Peraturan Daerah).

Bagian penting yang perlu terlaksana untuk sebuah pemerintah adalah tata kelola keuangannya, ini disebabkan karena kegunaan suatu

rencana dan pembuatan susunan anggaran yang diberlakukan sehingga pembiayaan seluruh keperluan dalam melaksanakan berbagai kegiatan kerja dapat direalisasikan sesuai keinginan dan harapan tetapi tetap berdasarkan anggaran yang sudah disetujui. Tiap-tiap pelaksanaan program kerja di sebuah pemerintah dipastikan telah mempunyai anggaran, dari hal tersebut diperlukan pembuatan rencana yang tepat, serta pembuatan susunan anggaran yang relevan serta diharuskan berfokus pada masing-masing program kerja guna implementasi anggaran mampu berlangsung sejalan dengan pemberian anggaran yang sudah disepakati.

Indonesia merupakan negara yang juga telah menghasilkan peningkatan yang cukup signifikan dari aspek sistem ataupun pelaksanaannya. Kebijakan yang telah diterapkan Indonesia di tahun 2005 sudah dengan basis kinerja di tiap-tiap pemerintah pusat bahkan daerah. Artinya, anggaran dengan basis kinerja diharapkan mampu menghasilkan pertanggung jawaban yang baik, serta target pemberian anggaran di sebuah tempat dengan terbuka dan pasti, sehingga adanya keterlibatan masyarakat untuk menjadi bagian transparansi anggaran di sebuah institusi. Di tahun 2009, penerapan anggaran dengan basis kinerja juga telah digunakan dan direalisasikan oleh pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwasanya realisasi anggaran bertujuan dalam penerapan berbagai dasar cara laporan disajikan yang berguna terhadap keperluan pemerintahan untuk mencukupi sasaran akuntabilitas yang telah diberlakukan dari kebijakan undang-undang, dan berguna dalam memberi informasi realisasi serta mengumumkan substansi rencana keuangan. Melakukan analisis realisasi serta anggaran di sebuah pemerintahan telah menghasilkan beberapa hal yang tidak selaras serta tidak sesuai dari anggaran dana yang telah digunakan, mulai dari awal tahun dan yang sudah direalisasikan pemerintahan, ini dikarenakan adanya penggunaan dana yang tidak berlangsung dengan tepat dan baik, sehingga memungkinkan terdapat kekurangan penerapan fungsi pengelolaan serta pengendalian yang dilakukan pemerintahan di tiap-tiap pelaksanaan program kerja. Ketidaksesuaian anggaran yang didapatkan tersebut dapat juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Ketidaksesuaian dan juga realisasi yang berbeda disebut juga sebagai varians.

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini antara lain : "1) Bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Kota Medan?; 2) Apakah terdapat hambatan dalam proses pembuatan susunan anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Kota Medan, dan bagaimana solusinya?; 3) Apakah realisasi anggaran sesuai dengan penganggaran di awal tahun pada PBKAD Kota Medan?; Maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Kota Medan; 2) Untuk mengetahui tentang kendala dan

penyelesaian dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada BPKAD Kota Medan; 3) Untuk mengetahui tentang realisasi anggaran dan penganggaran pada BPKAD pemerintahan Kota Medan”.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut penelitian sebelumnya, yaitu "Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan kualitas laporan realisasi anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin" dengan penulis Ifrah Juli Dwiyanti yaitu berdasarkan penelitian tersebut apat diketahui bahwa dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja maka itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran di suatu pemerintahan.

Akuntansi

Berdasarkan pendapat Suwardjono (2013:10) menjelaskan akuntansi sebagai sebuah kegiatan yang memberikan jasa dengan menunjukkan bahwasanya akuntansi penting untuk digunakan dalam perancangan serta penyedia informasi finansial yang berguna terhadap aspek perekonomian dan sosial dimana akuntansi digunakan oleh suatu Negara. Sementara itu, berdasarkan penjelasan Sumarsan (2017:1), akuntansi merupakan sebuah kesenian yang mengumpulkan, melakukan identifikasi, klasifikasi, pencatatan transaksi, dan peristiwa yang berkaitan pada finansial, hingga mampu memperoleh informasi ataupun penggunaan laporan yang diterapkan beberapa pihak yang berwenang.

Sesuai kebijakan pemerintahan Nomor 24. Tahun 2005, lalu digantikan oleh kebijakan Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standarisasi Akuntansi Pemerintahan), menyatakan bahwa SAP ditunjukkan dengan berbentuk PSAP (Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintahan), dipenuhi dengan Pengantar dan disusunkan dengan mengarah pada Rangkaian Konsep Akuntansi Pemerintahan.

Anggaran

Berdasarkan pernyataan Sujarweni (2015:28), menjelaskan bahwasanya anggaran bagian publik ialah wujud tanggung jawab atas pemilik manajerial organisasi yang berguna memberi informasi tentang seluruh kegiatan serta aktivitas yang dilaksanakan kelompok tersebut pada pemegang organisasi tentang tata kelola dana masyarakat dan penerapan program kerja yang dibuat dan diberikan pembiayaan dari masyarakat. Berdasarkan pernyataan Halim (2009:61), menjelaskan bahwasanya anggaran merupakan suatu penyusunan rencana yang dibuat berbentuk data kuantitatif pada suatu anggaran dalam 1 periode serta biasanya periode dalam anggaran berjalan dalam durasi 1 periode. Sementara itu, dari penjelasan Nafarin (2000), bahwa anggaran merupakan perencanaan yang ditulis mengenai suatu kelompok (organisasi) yang ditunjukkan dengan

kuantitatif berjangka waktu terbatas. Anggaran tersebut berbentuk satuan moneter, namun dapat juga ditunjukkan berbentuk satuan jasa atau barang. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil bahwa anggaran merupakan sebuah rancangan keuangan untuk sebuah institusi berjangka waktu satu periode.

Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan pendapat Abdul Halim (2007) menjelaskan bahwa anggaran dengan basis kinerja merupakan suatu teknik pemberian anggaran untuk manajerial dalam menghubungkan tiap-tiap dana yang diberikan dan ditujukan pada aktivitas dengan harapan hasil sesuai keinginan terkhusus hasil yang efisien dan tercapai berdasarkan pengeluaran. Anggaran tersebut juga dapat dimaksud untuk sebuah pemberian anggaran berdasarkan hasil kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta berpedoman pada ketetapan SKPD pada masing-masing daerah.

Terdapat beberapa hal dasar yang berbeda terhadap dua pendekatan anggaran yaitu pendekatan baru dan lama. Pendekatan lama atau pra anggaran yaitu dengan basis kinerja yang berfokus pada ketersediaan tenaga masukan yang dibutuhkan pada tiap-tiap kelompok (organisasi). Sedangkan pendekatan baru yaitu dengan basis kinerja dengan orientasi terhadap pencapaian hasil dari tenaga manusia. Sesuai dengan konsepnya, bahwa penganggaran dengan basis kinerja dapat diterima secara wajar dari pada dengan basis input dikarenakan terdapat keterkaitan yang rasional dari ketersediaan sumber daya dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan kebijakan pemerintahan Nomor 90 Tahun 2010, PBK (Penganggaran dengan Basis Kinerja) memiliki tujuan dalam menambah tingkatan mutu anggaran masyarakat. Mutu sifat rencana belanja dapat dicapai jika: (1) penggunaan negara dijalankan dengan produktif dan sungguh-sungguh (efektifitas fungsional); (2) memperluas tanggung jawab moneter publik, dan (3) mencapai keterusterangan terhadap tata kelola anggaran masyarakat, dan hal tersebut dapat tercapai dengan mendapatkan data sesuai fakta yang menjadi penggunaan alat untuk menetapkan alokasi anggaran yang diberikan (OECD 2007).

Anggaran dengan basis kinerja yaitu sebuah teknik yang mengkaitkan pencapaian hasil dengan pengalokasian anggaran. Terdapat 3 tahapan dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja, Pertama-tama, perencanaan presentase adalah jenis perencanaan publik yang menerapkan data eksekusi dalam sistem perencanaan. Meskipun demikian, data ini belum dimanfaatkan sebagai alasan untuk memutuskan berapa besaran peruntukan rencana keuangan. Kedua, Eksekusi informasi perencanaan adalah desain perencanaan publik yang selama ini melibatkan eksekusi data dalam siklus dinamis untuk porsi rencana keuangan namun tidak secara alami mempengaruhi seberapa besar penugasan. Ketiga, perencanaan eksekusi langsung adalah desain perencanaan publik yang secara langsung

menghubungkan data eksekusi dengan strategi alokasi rencana keuangan publik (Kelly and Wanna 2000; OECD 2007).

Realisasi Anggaran

Berdasarkan penjelasan Erlina Rasdianto (2013:23) mengenai Laporan Realisasi Anggaran adalah: "Laporan Realisasi Anggaran mengemukakan sumber penggunaan, dan pemakaian sumber dana yang diolah oleh pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan." Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan yang mencakup data pengakuan gaji, konsumsi, perpindahan, kelebihan/kekurangan, pemberian biaya serta kelebihan atau kekurangan biaya anggaran berupa sisa, dan dibandingkan dengan anggaran di satu periode. Laporan tersebut juga menampilkan garis besar sumber, pengalokasian, serta penggunaan tata kelola sumber daya keuangan dari pemerintahan daerah atau pusat yang menunjukkan perbedaan dari realisasi dan anggarannya di satu periode pemberian laporan. LRA juga mencakup unsur dengan langsung terbagi dari pendapatan LRA, pembiayaan, transfer, serta belanja.

Target analisis varians yaitu analisa pada realisasi belanja yang berselisih atau berbeda dan ditunjukkan dengan rumus berikut:

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690-900-327 Tahun 1996, Standar Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Daerah sebagai berikut

1. Bila pencapaian lebih dari 100%, anggaran dinyatakan tidak efisiensi.
2. Bila pencapaian berkisar 90%-100% anggaran dinyatakan kurang efisiensi.
3. Bila pencapaian berkisar 80%-90%, anggaran dinyatakan cukup efisiensi.
4. Bila pencapaian berkisar 60% - 80% anggaran termasuk efektif.
5. Bila pencapaian dibawah 60%, anggaran termasuk sangat efisiensi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:9) suatu metode penelitian dengan atas dasar penggunaan filsafat post-positivisme dalam melakukan riset di situasi objek yang alami disebut sebagai metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan lawan sebagai eksperimen, dan instrumen pokok dalam metode mengumpulkan data yaitu peneliti dilaksanakan dengan trigulasi. Penggunaan metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode ini berguna dalam menjelaskan secara kompleks mengenai data sesuai fakta serta menerangkan sebuah kondisi atau kejadian dalam pembuatan susunan anggaran serta selisih realisasi terhadap anggaran belanja daerah beserta dengan kualitatif (kalimat penjelasan).

Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2015), informasi subjektif dapat dicirikan sebagai informasi berupa kata-kata, gambar, serta rencana.

Sementara itu, data kuantitatif mampu dijelaskan untuk data dengan bentuk angka dan data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif akan dihasilkan dari keiatan wawancara dan berguna untuk gambaran umum terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Medan dan penggunaan data kuantitatif yaitu Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021.

Menurut Sugiyono (2016: 225), suatu data yang didapatkan seorang peneliti berdasarkan sumber data yang diinginkan disebut sebagai data primet, data ini juga menjadi data yang pasti dan terbaru yang mempunyai karakter tersendiri. Dalam memperoleh data tersebut, dilakukan pengumpulan data secara langsung oleh peneliti. Penggunaan sumber data primer yaitu didapatkan secara langsung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Pelaksanaan metode dalam mengumpulkan data yaitu wawancara serta dokumentasi. Penjelasan yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil analisa belanja daerah menerapkan metode analisa dari varians belanja yang diperhitungkan. Mengingat laporan pengakuan rencana pengeluaran, seberapa besar fluktuasi rencana keuangan dan penggunaannya biasanya dikomunikasikan sebagai nilai atau tingkat yang realita. Proses analisis pada penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data berkaitan pada penelitian dari hasil pelaporan realisasi belanja dan juga hasil wawancara yang dilakukan.
2. Lengkapi informasi yang sudah didapatkan.
3. Menerangkan data yang didapatkan mulai dari berbagai faktor serta prosedur yang dijadikan bahan pertimbangan pembuatan susunan anggaran, lalu melakukan analisis selisih anggaran dengan menerapkan perangkat investigasi, khususnya perubahan konsumsi provinsi di mana Anda akan mengamati perbedaannya dan kemudian memastikan tingkat pencapaiannya.
4. Membuat simpulan beserta saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kota Medan

Pada zaman dahulu kota Medan dikenal dengan Tanah Deli dan keadaan tanahnya lembab dengan luas kurang lebih 4000 hektar. Beberapa jalur air melintasi kota Medan dan masing-masing bermuara di Selat Malaka. Perairan tersebut adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada awalnya Guru Patimpus-lah yang membuka kota Medan yang terletak di Tanah Deli, sehingga sejak masa perbatasan, orang-orang pada umumnya menghubungkan Medan dengan Deli. Setelah masa otonomi, suasana Medan Deli secara signifikan menghilang dan pada akhirnya menjadi kurang terkenal. Sebelumnya, orang-orang bernama Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) hingga Sungai Wampu di Langkat,

sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa saat itu tidak mencakup wilayah di antara kedua aliran air tersebut.

Menjelang awal kemajuannya adalah sebuah kota kecil bernama "Medan Putri". Majunya Kampung "Medan Putri" jangan dilihat dari posisi fundamentalnya sejak ditemukan di pertemuan aliran sungai Deli dan Babura, tidak jauh dari Jalan Putri Hijau. Kedua aliran tersebut pada masa lalu merupakan jalur lalu lintas pertukaran yang sangat ramai, sehingga kota Medan Putri yang merupakan citra kota Medan tidak lama kemudian berubah menjadi pelabuhan pergerakan yang sangat penting.

Secara umum, kemajuan Kota Medan sudah menempatkan dirinya sebagai tempat pertukaran (perdagangan impor) sejak dulu. Sementara Medan dijadikan ibu kota pertokoan, selain itu kota Medan juga disulap menjadi tempat administrasi. Belum lama ini, selain sebagai wilayah kota, juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara.

Gambaran Umum BPKAD Pemerintahan Kota Medan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan merupakan sebuah lembaga yang mengurus dan mengatur tata kelola keuangan di Kota Medan. BPKAD memiliki visi misi untuk melakukan kewajiban sebagai badan pengelolaan keuangan daerah. Visi adalah pendekatan untuk melihat ke depan, di mana kantor-kantor pemerintah harus dicapai dengan tujuan agar mereka dapat eksis, penuh harapan dan inventif. Sebagai ketentuan, visi yaitu perspektif tentang masa mendatang yang perlu dipahami dari lembaga tersebut, visi tersebut ditetapkan atas dasar pencapaian yang diinginkan, sesuai dengan tujuan dan strategi yang pasti, dengan orientasi untuk kedepannya serta dikehendaki bisa meningkatkan komitmen pada lingkungan badan tersebut.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diatur guna dapat mendorong Visi dan Misi Kota Medan.

Adapun misi BPKAD tersebut, antara lain:

1. Peningkatan keterbukaan, hasil beserta kinerja yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sistem tata kelola keuangan daerah menggunakan teknologi terbaru dan terbaik.
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Terdapat beberapa tujuan dari BPKAD tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan Layanan Administratif kantor dan Aparatur Pemerintahan Kota Medan

Keperluan fasilitas administratif kantor dapat tercapai dengan lancarnya pendorong berbagai tugas pemberian layanan untuk aparatur yang terdapat di pemerintahan kota Medan yang bermanfaat berdasarkan SDM (Sumber Daya Manusia), maka layanan administratif

serta aparatur mampu berlangsung sebagaimana perencanaan dan program kerja yang sudah dibuat serta mampu mengaplikasikan kualitas layanan dan meningkatkan mutu layanan publik.

2. Meningkatkan Keterbukaan, Hasil Dan Kinerja Yang Efektif Dan Efisien Di Pemerintahan Kota Medan

Pelaksanaan tata kelola keuangan dari BPKAD Kota Medan diharuskan mempunyai kegunaan yang pasti dengan basis kinerja, karena akan mampu ditinjau melalui hasil kinerja yang dilaksanakan dan aparatur pemerintahan mempunyai peningkatan wawasan, pengalaman, keterampilan, serta beberapa ahli yang relevan pada bidang tugas yang dijalani atas dasar aturan pelaksanaan pemerintah terkhusus pada aspek tata kelola keuangan daerah yang bermutu, terbuka, memiliki efektifitas dan efisiensi.

3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi yang lebih baik.

Mengenai tujuan dari organisasi Pemerintah Kota Medan dalam peningkatan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan di Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat melalui pelayanan yang prima, terjangkau dan adil, hal ini dapat tercapai pada sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya.

4. Lebih menaikkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Kinerja sumber daya manusia dapat tercapai jika berdasarkan tujuan kelompok (organisasi) kinerja yang berkiatan pada kontribusi yang mempengaruhi berbagai faktor lainnya. Maka dari itu, kinerja tersebut dapat ditingkatkan aparatur pemerintahan Kota Medan dengan cara penerapan yang dijalankan.

Penyusunan Anggaran

Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam pasal 2 Permendagri No.64 Tahun 2020 meliputi: (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknik penyusunan APBD.

Dari kebijakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, menjelaskan mengenai berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan anggaran dan susunan APBD Tahun 2021 tertuang pada format yang tersusun dari : 1) Aturan APBD serta prioritasnya dalam penganggaran yang bersifat sementara, 2) Perencanaan program kerja daerah, 3) Perancangan aturan

daerah mengenai APBD, 4) Perancangan aturan pimpinan daerah mengenai penjelasan APBD, serta peraturan yang diubah dan juga prioritasnya yang bersifat sementara.

Beberapa asumsi dalam penentuan APBN berguna sebagai sisi pemberian atau pembuatan anggaran pembangunan secara menyeluruh (nasional) yang mempunyai dampak positif nyata ataupun tidak pada situasi anggaran daerah. Dampak tersebut kuat karena peraturan APBN yang diperoleh beberapa daerah secara struktural APBD dominan dari pendapatan transferya, khususnya kota Medan.

Menanggapi situasi ekonomi global yang berada di tengah keterlambatan, maka pemerintah sudah menentukan beberapa asumsi indeks perekonomian makro. Hal tersebut telah tertuang dalam RKP berikut ini:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 persen.
- b. Tingkat inflasi 2,0 – 4,0 persen.
- c. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp. 13.900 – 15.000 per dolar.
- d. Suku bunga SPN 10 tahun 6,67 – 9,56 persen.
- e. Harga minyak Indonesia (ICP) US \$55 – 65 per barrel.
- f. Lifting minyak 704.000 barel/hari.
- g. Lifting gas bumi 1.288.000 barel/hari.

Hambatan Dan Solusi Dalam Penyusunan Anggaran

Menurut Erani selaku Direksi INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), dasar permasalahan anggaran di Indonesia ada 6 bagian, antara lain:

- a. Adanya praktek atau perbuatan korupsi akan dana APBN atau APBD sehingga mengalami kekurangan/defisit.
- b. Fungsi APBN merupakan sebagai instrumen dasar dalam pendekatan yang bertujuan untuk kepercayaan konstitusi, namun hal tersebut tidak dimengerti dan dipergunakan sebagai tahapan dalam mengambil keputusan penggunaan sumber anggaran.
- c. Pendapat mengenai ekonomi makro yang dirancang hanya berlandaskan kepada visi yang kurang luas.
- d. Total besarnya anggaran tidak menggambarkan masalah dan solusi dasar untuk pembangunan nasional.
- e. Isi dari undang-undang tidak semuanya dijalankan dengan baik.
- f. Perhitungan kas negara termasuk rendah, khususnya melalui pajak dan juga PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), hal ini memberikan kesempatan adanya tindakan koruptif yang dilakukan secara terus-menerus.

Terdapat dua pokok penting yang harus diperhatikan sebagai halangan dalam merealisasikan APBD sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat;

- a. Berhubungan dengan perilaku politik dari pejabat politik maupun pejabat publik daerah yang merasa terganggu atau tidak suka dengan transparansi anggaran, karena hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi otoritas yang selama ini mereka nikmati.
- b. Isu-isu yang terkait dengan pedoman konvensional saat ini, bahwa setiap pihak dan yayasan memiliki kendala kekuatan dan metodologinya sendiri. Dua kendala yang menyebabkan distribusi rencana belanja dalam APBD seringkali tidak mencerminkan kecenderungan masyarakat pada umumnya. Hingga saat ini, hambatan yang sering muncul dan menjadi alasan kurangnya ketersediaan layanan yang berkualitas oleh pemerintahan adalah karena dana yang terbatas, dan berfokus pada optimalisasi eksplorasi PAD.

Berbagai masalah yang didapatkan selama proses pembuatan susunan APBD, antara lain :

- Waktu yang tidak tepat ketika proses penyusunan, hal ini dilihat dari tiap tahun beberapa daerah terbilang cukup lama dalam membuat penyusunan anggaran pemerintahan.
- Terdapat perbedaan antara anggaran yang dibutuhkan dari pada anggaran yang diberikan di awal periode.
- Kurangnya semangat efisiensi, hal ini berkairan pada masalah kurangnya anggaran sehingga pemerintahan mengalami defisit dana karena keborosan yang dilakukan.
- Anggaran yang tersedia tidak berpihak pada publik.

Solusi terhadap Permasalahan Dalam Penyusunan Anggaran Daerah

Langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan, pada tahapan pembuatan susunan anggaran dibutuhkan adanya terobosan yang dilaksanakan sehingga masalah yang ada dalam pembuatan susunan APBD dapat diatasi, antara lain:

- a. Diperlukan adanya beberapa inovasi pada tahapan pembuatan rencana partisipatif dengan baik hingga berbagai aspirasi politik yang dipercayai betul-betul diambil dan masuk pada dokumen pembuatan rencana. Artinya, pokok bahasan perancangan APBD mampu memperhatikan seberapa besar dana yang harus ditempatkan serta tidak membebani beberapa transaksi politik.
- b. Diperlukan pengembangan metode seperti diskusi, dialog atau lainnya tentang pembuatan rencana serta anggaran dengan basis kinerja. Hal ini bertujuan dalam melakukan perubahan pandangan dunia yang biasa yang menyoroti perencanaan kas menjadi presentasi yang menyatukan pandangan dunia yang berkonsentrasi pada pengaturan latihan yang membahas pendorong utama masalah secara lokal.
- c. Diperlukan penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD. Sebagai aturan umum, negara-negara teritorial

yang mengalami keterlambatan APBD adalah daerah yang belum matang, sehingga perlu tambahan bantuan dan pengawasan serius dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pemberian sanksi sesuai aturan harus tetap dijalankan namun dengan sanksi yang lebih spesifik. Pemerintah daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah kepada Menteri Keuangan paling lama tanggal 20 Maret. Bagi yang terlambat, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)-nya ditunda 25 persen per bulan.

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, rancangan kelebihan/kekurangan, pembiayaan, dan sisa rencana pengeluaran/kekurangan, yang masing-masing diperbandingkan dan rencana keuangannya dalam satu periode. Pada pemerintah Kota Medan juga memiliki laporan realisasi anggaran pada setiap periode nya. Berikut data laporan realisasi anggaran Pada BPKAD Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2020.

Tahun	Pendapatan - LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	Pendapatan Asli Daerah : 40.798.246.026,54 Belanja (Belanja Operasi dan Belanja Modal : 19.287.671.267,00	21.510.574.759,54	41.931.536.394,57	63,2%
2021	Pendapatan Asli Daerah : 74.179.201.958,00 Belanja (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga) : 173.958.587.375,00	99.779.385.417,00	8.023.108.798,05	67,81%

Sumber : Laporan realisasi anggaran pendataan dan belanja daerah Unit organisasi BPKAD Pemko Medan tahun 2020 &2021.

Analisis selisih antara anggaran dengan realisasi berdasarkan analisis varians, selisih tahun 2020 sebesar Rp20.420.961.635,03 dan

tingkat persentase ketercapaian belanja 63,2%. Selisih tahun 2021 sebesar Rp107.802.494.215,05 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 67,81%. Dilihat dari kedua hasil laporan realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2021 dalam penyerapannya sudah baik, sehingga selisih yang ada pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Medan tidak melebihi dari yang dianggarkan, meskipun melebihi semua harus melalui instrumen koreksi rencana keuangan. Mencermati perbedaan yang terjadi dengan menggunakan penelitian fluktuasi menunjukkan perbedaan yang sangat kontras dari rencana anggaran, selisih tersebut disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan melakukan penghematan anggaran dalam setiap kegiatan. Walaupun dari segi pelaksanaan moneterinya hilang dan tidak mencapai 100 persen, namun jika dengan hasil tersebut hasil tersebut telah tercapai, kemudian itu adalah sesuatu yang patut disyukuri, namun ketika berada pada posisi melawan norma dari sisi keuangan sudah mencapai. Akan tetapi, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan telah melaksanakan tanggung jawab yang baik dalam pengelolaan keuangan, jika kita lihat bersama situasi Negara kita dalam keadaan Pandemi Covid-19, karena telah melakukan penghematan pada anggaran dan setiap luarannya boleh tercapai. Dan apabila ketika ada penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) maka akan diterbitkan atau dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWAL). Oleh sebab itu, pentingnya perencanaan biaya atau anggaran untuk pengendalian anggaran dan juga pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis kinerja agar tidak terjadi realisasi yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan pada periode awal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Prosedur penyusunan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan melalui beberapa proses atau tahapan yaitu: penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai kepada penetapannya oleh Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, penyusunan dan penyampaian Surat Edaran (SE) tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Dilakukan perhitungan ketika penyusunan anggaran belanja sehingga memperoleh beberapa faktor untuk mempertimbangkan hasil atau tarif yang sesuai dan efisien, serta anggaran di tahun sebelumnya. Diperoleh hasil bahwa varians yang dilaksanakan secara menyeluruh mendapatkan seluruh yang terbilang menghasilkan keuntungan, dikarenakan realiasi termasuk lebih rendah dibandingkan anggaran yang diberikan. Dampak adanya selisih tersebut karena terdapat aktivitas yang dikurang karena akibat pandemi yang belum selesai. Di tahun 2020, selisih yang diterima yaitu Rp. 20.420.961.635,03 dengan tingkat persentase belanja yang tercapai 63,2%. Sedangkan di tahun 2021 yaitu Rp. 107.802.494.215,05 dengan tingkat persentase belanja yang tercapai 67,81%.

Saran

1. Dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan harus tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan agar anggaran yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga penyerapan anggaran berjalan dengan baik dan efektif.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan dapat melakukan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan selisih yang terjadi pada program-program anggaran belanja. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan angka anggaran yang lebih memperhatikan standar harga pasar dan memperhatikan program yang perlu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

- Basri, Ramlah.(2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Volume 1 No.4, Hal.202-212.
- Fanda Jesika,dkk. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi, Volume15, Hal 131-138.
- Budi Safatul, dkk. (2018). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Migas Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Jurnal Kolegial, Vol. 6, No. 2.
- Hesrini. Elly. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Gresik. Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA. Vol.1 No.1

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 3 No 2 (2023) 153-166 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v3i2.1504

Agato Hariadi Putra. (2018). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi. Vol.7 No. 11.

Mamulati Irman, dkk. (2018). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran. Jurnal KAWASA. Vol. VIII, No. 5.

Cindy Kareima, dkk. Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kefektifitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 13.

Pustaka berbentuk buku

Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Medan Tahun 2021.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.